ABSTRAK

Andika Krisna R.C.W, NIM 126103202099, Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Tulunggagung, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Yusron Munawir, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Peran, UPTD PPA, Kekerasan Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya data kasus kekerasan anak di website SIMFFONI PPA pada Februari 2024 bahwa Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan anak dengan jumlah kurang lebih 260 korban dan di Kabupaten Tulungagung setelah peneliti melihat diwebsite radar Tulungagung ternyata pada Tahun 2022 kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 76 kasus mengurangi kasus terdiri dari 33 kasus kekerasan psikis 10 kasus, kekerasan seksual 22 kasus eksploitasi 1 kasus, *human trafficking* 2 kasus, penelantaran 6 kasus, lainnya 1 kasus. Setelah dibentuknya UPTD PPA pada akhir Tahun 2023 apakah bisa dapat mengurangi angka kekerasan pada anak di Kabupaten Tulungagung.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekersan pada anak di Kabupaten Tulunggagung? 2) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada anak Di Kabupaten Tulungagung? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulunggagung ? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tulunggagung. 2) Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Di Kabupaten Tulungagung.3) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Unit Pelaksana Teknis Derah Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tulunggagung.

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan penyajian data, penarikan kesimpulan dan pengecekan keabsahan. Pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu dengan ketekunan pengamatan dan triagulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dilakukan dengan berbagai tindakan

menurut Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, diantaranya yaitu:a) memberikan pelayanan pengaduan masyarakat yang hendak melakukan pengaduan jika terdapat kasus kekerasan anak;b) melakukan penjangkauan terhadap korban yang mengalami kekerasan;c) melakukan pengelolaan terhadap kasus kekerasan anak; d) melakukan layanan penampungan sementara kepada anak korban kekerasan;e). melakukan mediasi antara korban dan pelaku dan berusaha menyelesaikan permasalahan melalui jalur di luar pengadilan serta;f) memberikan layanan berupa pendampingan terhadap anak korban kekerasan dengan tujuan untuk memulihkan mental dan fisik anak. Dalam setiap proses penanganan kekerasan anak tersebut terdapat kendala dari masing-masing proses tersebut baik dari kendala internal dari fasilitas yang kurang memadai maupun kesadaran dari Masyarakat. 2) Upaya yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kendala pada saat penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung berupa upaya *preventif* seperti melakukan sosialisasi baik di dalam media sosial (Webinar) maupun lingkungan setempat. Sementara itu juga terdapat Upaya *represif* terhadap kendala saat proses penanganan kekerasan anak berupa pengkoordinasian lintas sektor*, case conference*, bekerjasama dengan mitra jejaring yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pendampingan psikologis maupun hukum sampai kasus berakhir 3) Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung merupakan peraturan yang membahas mengenai penanganan tindak kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung, jika ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah peraturan tersebut merupakan peraturan yang bersifat sosial-objektif (*Al-Maslahah al-'ammah),* di dalamnya terkandung 2 unsur *maqashid syariah* yakni *hifdzu an-nafs* dan *hifdzu an-nasl* yang terdapat dalam pasal 6 Perbup Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

ABSTRACT

Andika Krisna R.C.W, Student ID 126103202099, Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Handling Cases of Violence Against Children in Tulungagung Regency, Constitutional Law Study Program, State Islamic University of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Yusron Munawir, S.H.I., M.H.

Keywords: Role, PPA Technical Implementation Unit (UPTD), Child Violence

This research is motivated by the data on child violence cases on the SIMFFONI PPA website in February 2024, indicating that East Java has the highest number of child violence cases, with approximately 260 victims. Upon reviewing the Tulungagung radar website, the researcher found that in 2022, there were 76 cases of violence against children and women in Tulungagung Regency, consisting of 33 cases of psychological violence, 10 cases of sexual violence, 22 cases of exploitation, 1 case of human trafficking, 2 cases of neglect, and 1 other case. With the establishment of the PPA Technical Implementation Unit (UPTD) at the end of 2023, it is questioned whether it can reduce the incidence of child violence in Tulungagung Regency.

The focus of this research is: 1) What is the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency? 2) What efforts does the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children make in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency? 3) What is the view of fiqih siyasah on cases of violence against children? The objectives of this research are: 1) To determine the role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in handling cases of violence against children in Tulungagung Regency. 2) To identify the obstacles in handling cases of violence in Tulungagung Regency. 3) To understand the perspective of fiqih siyasah on regulations regarding the handling of violence against children in Tulungagung Regency.

The research method employed by the researcher is a type of juridical-empirical study using a qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique involves data presentation, drawing conclusions, and checking validity. The validity of the data is ensured through diligent observation and triangulation.

The results of this study indicate that: 1) The role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Tulungagung Regency in handling cases of violence against children is carried out through various actions in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2023,

including: a) providing community complaint services for those who wish to report cases of child violence; b) reaching out to victims of violence; c) managing cases of child violence; d) providing temporary shelter for child victims of violence; e) mediating between victims and perpetrators and seeking to resolve issues outside of court; and f) providing support services to child victims of violence with the aim of restoring their mental and physical well-being. In each process of handling child violence, there are obstacles from each of these processes, both from internal constraints such as inadequate facilities and from the awareness of the community. 2) Efforts made by the PPA Technical Implementation Unit (UPTD) in addressing obstacles during the handling of child violence cases in Tulungagung Regency include preventive measures such as conducting socialization through social media (webinars) and local communities. Meanwhile, there are also repressive efforts against obstacles during the process of handling child violence cases, such as cross-sector coordination, case conferences, collaboration with network partners including the Police, Prosecutor's Office, Court, and psychological and legal assistance until the case is resolved. 3) Regional Regulation of Tulungagung Regency No. 3 of 2023 addresses the handling of child violence in Tulungagung Regency. From the perspective of siyasah, this regulation is considered a socially-objective regulation (Al-Maslahah al-'ammah), containing two elements of maqasid al-shariah, namely the preservation of life and the preservation of lineage, which are included in Article 6 of Regional Regulation of Tulungagung Regency No. 3 of 2023.

ملخص

أنديكا كريسنا ر.س.و.و، رقم الطالب ١٢٦١٠٣٢٠٢٠٩٩، دور وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ، برنامج دراسات القانون الدستوري، جامعة الإسلامية الحكومية السيد علي رحمت الله تولونجاغونغ، ٢٠٢٤، المشرف: يوسرون مونـاوير، ش.ه.إ.، م.ه.

الكلمات الرئيسية: دور، وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل، عنف الأطفال

سيمفوني بي بي بي إي تعتمد هذه الدراسة على وجود بيانات حول حالات عنف الأطفال في موقع الويب. في فبراير ٢٠٢٤، حيث أظهر أن جاوا تيمور تحتل المرتبة الأولى في عدد حالات عنف الأطفال بنحو ٢٦٠ ضحية، وفي مقاطعة تولونجاغونغ بعد أن راجع الباحث موقع رادار تولونجاغونغ تبين أنه في عام ٢٠٢٢ وصل عدد حالات العنف ضد الأطفال والنساء إلى ٧٦ حالة مكونة من ٣٣ حالة عنف نفسي و ١٠ حالات، و ٢٢ حالة عنف جنسي و ١ حالة استغلال، و ٢ حالة تجارة بشرية، و ٦ حالات إهمال، وحالة واحدة أخرى. بعد تشكيل وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في نهاية عام ٢٠٢٣، هل يمكن أن تقلل من أعداد حالات العنف ضد الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟

تتمحور محور هذا البحث حول: ١) كيفية دور وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟ ٢) ما هي الجهود التي تقوم بها وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ؟ ٣) ما هو رأي الفقه السياسي الدستوري في حالات العنف ضد الأطفال؟ أما أهداف هذا البحث فهي: ١) لمعرفة دور وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال التي تحدث في مقاطعة تولونجاغونغ. ٢) لمعرفة العوائق في التعامل مع حالات العنف في مقاطعة تولونجاغونغ. ٣) لمعرفة رؤية الفقه السياسي الدستوري فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بمعالجة حالات العنف ضد الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ.

الطريقة البحثية التي استخدمها الباحث هي نوع من البحث القانوني التجريبي باستخدام النهج النوعي. أما تقنيات جمع البيانات فتتمثل في المراقبة والمقابلات والوثائق. بينما تقنيات تحليل البيانات تشمل تقديم البيانات واستخلاص الاستنتاجات والتحقق من صحة البيانات. التحقق من صحة البيانات الذي استخدمه الباحث هو من خلال الاهتمام بالملاحظة والمثلثية.

نتائج هذا البحث تشير إلى أن: ١) دور وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في مقاطعة تولونجاغونغ في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال يتم من خلال مجموعة من الإجراءات وفقًا للوائح القرارية رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣، وتشمل منها: ١. تقديم خدمة الشكاوى للمجتمع الذي ينوي تقديم شكوى في حالة وجود حالات عنف ضد الأطفال؛ ٢. التواصل مع الضحايا الذين تعرضوا للعنف؛ ٣. إدارة حالات العنف ضد الأطفال؛ ٤. تقديم خدمة الإيواء المؤقت للأطفال ضحايا العنف؛ ٥. التوسط بين الضحية والجاني ومحاولة حل المشكلة خارج المحكمة؛ و ٦. تقديم خدمات الدعم للأطفال ضحايا العنف بهدف استعادة صحتهم النفسية والجسدية. في كل عملية معالجة حالات عنف الأطفال تواجه التحديات من كل عملية، سواء كانت من التحديات الداخلية ناتجة عن مرافق غير كافية أو من نقص الوعي لدى المجتمع. ٢) جهود وحدة الإنفاذ التقني المحلية لحماية المرأة والطفل في التعامل مع التحديات أثناء معالجة حالات عنف الأطفال في مقاطعة تولونجاغونغ تشمل جهودًا وقائية مثل إجراء التوعية سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الندوات عبر الإنترنت) أو في البيئة المحلية. وفي الوقت نفسه، توجد جهود قمعية تجاه التحديات أثناء عملية معالجة حالات عنف الأطفال مثل التنسيق بين القطاعات المختلفة، وعقد جلسات المناقشة، والتعاون مع شركاء الشبكات مثل الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والدعم النفسي والقانوني حتى نهاية القضية. ٣)

القرار البلدي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ في مقاطعة تولونجاغونغ يتعامل مع معالجة حالات عنف الأطفال، إذا تمت المراجعة من منظور الفقه السياسي الدستوري، فإن هذا القرار يعد تشريعاً يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة (المصلحة العامة)، حيث يحتوي على عنصرين من مقاصد الشريعة وهما حفظ النفس وحفظ النسل كما هو موجود في المادة ٦ من القرار البلدي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ في مقاطعة تولونجاغونغ.